

## **POTENSI DESA WISATA BERBASIS PARTISIPASI MASYARAKAT ADAT DI DESA JATILUWIH KECAMATAN PENEHEL KABUPATEN TABANAN**

**Zulphiniar Priyandoko<sup>1\*</sup>, Deden Syarifudin<sup>2</sup>, Elin Herlina<sup>3</sup>, Ratih Rantini<sup>4</sup>**

<sup>1,2,4</sup> Universitas Pasundan, Bandung, Indonesia

<sup>3</sup>Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia

\*Korespondensi : [zulphiniar@unpas.ac.id](mailto:zulphiniar@unpas.ac.id)

### **ABSTRAK**

Desa Wisata Jatiluwih merupakan salah satu desa wisata yang ada di pulau Bali, tepat berada di kawasan Penebel, Kabupaten Tabanan. Perpaduan potensi wisata alam dan budaya menjadi daya tarik desa wisata ini. Apalagi saat UNESCO menetapkan Subak Jatiluwih sebagai Situs Warisan Dunia pada 2012 lalu. Namun dalam proses pengelolaan di desa wisata ini masyarakat lokal belum melibatkan masyarakat adat secara keseluruhan mengingat banyaknya pura, subak dan tempat sakral lainnya yang ada di Desa Jatiluwih. Padahal, kunci keberhasilan desa wisata adalah komitmen masyarakat setempat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat Desa Wisata Jatiluwih dan menilai penerapan kriteria dan prinsip Desa Wisata pada kondisi eksisting. Metodologi yang digunakan adalah kualitatif, mengumpulkan data primer berupa observasi dan wawancara mendalam, serta data sekunder dari penelitian terdahulu dan pihak terkait. Walaupun metode analisisnya sama dengan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Desa Wisata Jatiluwih masih sangat rendah, sehingga masyarakat setempat membutuhkan daya ungkit yang lebih optimal untuk berpartisipasi aktif dalam pengelolaan desa wisata mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan hingga pemantauan. Hal ini akan menanamkan bahwa nilai-nilai dari *trihita kirana* di masyarakat desa masih hidup dan digunakan sebagai kekuatan budaya dan etnografi desa.

**Kata Kunci :** Desa Wisata; Desa Jatiluwih; Partisipasi Masyarakat Adat; Subak

### **ABSTRACT**

*Jatiluwih Tourism Village is one of the tourist villages on the island of Bali, right in the Penebel area, Tabanan Regency. The combination of natural and cultural tourism potential is the main attraction of this tourist village. Especially when UNESCO designated Subak Jatiluwih as a World Heritage Site in 2012. However, in the management process in this tourist village, the local community still needs to involve the indigenous people as a whole, considering the many temples, subaks, and other sacred places in Jatiluwih Village. The key to a tourist village's success is the local community's commitment. This study aimed to determine the level of community participation in the*

*Jatiluwih Tourism Village and assess the application of the criteria and principles of the Tourism Village to the existing conditions. The methodology used is qualitative, collecting primary data from observations and in-depth interviews and secondary data from previous research and related parties. However, the analysis method is the same as the descriptive analysis method. The results of this study indicate that community participation in the management of the Jatiluwih Tourism Village still needs to be higher, so the local community needs more optimal leverage to actively participate in the management of the tourism village from planning to implementation to monitoring. This will instill that the values of Tri Hita Kirana in the village community are still alive and used as a cultural and ethnographic strength of the village.*

**Keywords :** *Tourist Village; Jatiluwih Village; Participation Of Indigenous Peoples; Subak*

#### **A. PENDAHULUAN**

Pariwisata merupakan salah satu sektor yang memiliki dampak penting bagi perkembangan daerah (Komariah et al., 2018; Salazar, 2012). Salah satu bentuk pengembangan pariwisata yang diterapkan di suatu destinasi adalah konsep desa wisata. Desa wisata merupakan kawasan pedesaan dengan berbagai daya tarik wisata. Tempat wisata ini dapat dirancang untuk menarik wisatawan untuk berkunjung, menetap, tinggal, belajar tentang budaya desa dan terlibat dalam kegiatan masyarakat desa (Jansen-Verbeke, 2009; Robertson, 2011; Salazar, 2012).

Munculnya fenomena pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat merupakan bentuk kritik terhadap pengelolaan pariwisata yang dilakukan tanpa partisipasi masyarakat dan dipandang tidak mampu memberdayakan masyarakat (Ainun et al., 2014; Bichler & Lösch, 2019; Shehade & Stylianou-Lambert, 2020). Konsep *community based tourism* dapat diterapkan dalam pengembangan desa wisata, sehingga masyarakat lokal dapat terlibat langsung dalam mengelola potensi yang ada di desanya (Salazar, 2012; Subejo et

al., 2021; Sudibya, 2018).

Pulau Bali merupakan salah satu tujuan wisata yang dikenal di kalangan wisatawan domestik maupun mancanegara karena keindahan alam, budaya dan sistem tatanan sosialnya (Anggraini, 2015; Isnawati & Lea Emilia Farida, 2018; Lily Dianasari, 2021; Tabanan et al., 2021). Adapun beberapa destinasi pedesaan yang menjadi tujuan wisata paling diminati, pengembangan desa wisata di Bali sudah mulai dilaksanakan secara maksimal.

Desa Jatiluwih merupakan salah satu desa wisata Bali yang berada di Kecamatan Penebeli, Kabupaten Tabanan. Secara geografis, ada berapa desa di dataran tinggi yang terletak di kaki Gunung Batukaru pada ketinggian 500 hingga 1500 mdpl itu. Salah satu daya tarik desa di Jatiluwih itu adalah Subak (Anggraini, 2015; Eko, 2014; Sumatra, 2020). Subak adalah organisasi masyarakat yang mengurus sistem pengairan sawah. Terletak di desa Jatiluwih, Subak dianggap sebagai pusat wisata penting Bali dan bahkan dinyatakan sebagai Situs Warisan Dunia UNESCO pada tahun 2012 (Fisk, 2013; Samsudin et al., 2021).

Keberadaan organisasi subak yang

dibantu oleh keindahan alam dan tatanan sosial yang unik menjadikan Desa Jatiluwih sebagai desa wisata. Pada dasarnya nama desa Jatiluwih sebagai desa wisata sudah berdiri sejak tahun 1994, namun saat itu jumlah wisatawan hanya sekitar 30.000 orang. Sejak Subak Jatiluwih ditetapkan sebagai Situs Warisan Dunia, jumlah wisatawan meningkat hingga mencapai 150.000 pengunjung per tahun.

Berdasarkan potensi tersebut, pengembangan untuk memperluas kapasitas Desa Wisata Jatiluwih akan terus dilakukan. Namun, proses pembangunan Desa Wisata Jatiluwih dalam pelaksanaannya terkesan tidak melibatkan masyarakat dalam proses pengelolaannya. Menurut penelitian sebelumnya, masyarakat tidak dilibatkan dalam proses perencanaan, pembangunan bahkan pemantauan, sehingga tidak efektif.

Selain itu, ditemukan pula kebijakan pemerintah yang tidak mempertimbangkan partisipasi masyarakat dan menimbulkan konflik dengan pembatasan pembangunan lingkungan ruang hijau (sawah) (Ishak & Syarifudin, 2014; Revayanti, 2017). Hal ini menjadi permasalahan yang perlu dikaji lebih detail agar masyarakat setempat tidak terus menjadi miskin tetapi mencari solusi melalui proses pemberdayaan sesuai potensi desa Jatiluwih.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji pengelolaan desa wisata di Desa Jatiluwih dari perspektif partisipasi masyarakat berdasarkan kondisi yang ada. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi yang ada di Desa Wisata Jatiluwih, untuk mengetahui kesetaraan prinsip dan kriteria desa wisata yang diterapkan di Desa Wisata Jatiluwih, dan untuk mempelajari bentuk partisipasi

masyarakat. Di Administrasi Desa Wisata Jatiluwih.

Wisata desa adalah suatu bentuk wisata di mana sekelompok wisatawan tinggal di atau dekat kehidupan tradisional atau di desa-desa terpencil dan belajar tentang kehidupan desa dan lingkungan setempat. Mengenai interaksi antara wisatawan dan masyarakat lokal, hal itu memberikan kesempatan belajar bagi keduanya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan (A. Djatmiko et al., 2021; Suherman et al., 2021).

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu aspek terpenting dalam pengembangan desa wisata (Ambarsari, 2017; Dani Rahu & Suprayitno, 2021). Hal ini dikarenakan pengembangan desa wisata banyak menggunakan sumber daya yang dimiliki masyarakat. Kota memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan pengembangan desa wisata, sehingga masyarakat yang tidak berdaya membutuhkan kekuatan untuk menciptakan kemandirian dan peningkatan kesejahteraan ekonomi (kekuasaan) (Mafaza & Setyowati, 2020; Purnamasari, 2011).

Melalui produk wisata yang ditawarkan, arah yang tepat adalah dengan menonjolkan karakter asli Desa jatiluwih dalam pengembangan produk wisata. Konsep pengembangan desa wisata harus mengimplementasikan konsep pengembangan spasial dan non spasial. Konsep tata ruang terdiri dari rute wisata, pilihan transportasi khusus dan penawaran pendukung wisata. Meski tidak secara spasial, melalui penetapan peraturan adat untuk kegiatan wisata, pengembangan desa berbasis agrowisata, penyediaan jasa penunjang wisata dan melibatkan masyarakat

adat dalam pengembangan dan pelaksanaan peraturan zonasi.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif (Azura et al., 2020; Susanti et al., 2022; Yastri et al., 2022). Kegiatan penelitian dilaksanakan pada bulan Juli sampai dengan November 2022 yang mengambil lokasi di Desa Jatiluwih Kecamatan Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan Provinsi Bali. Studi ini merupakan proses dari evaluasi dan analisis terhadap penanganan permasalahan kawasan Desa Wisata Jatiluwih (Ari Djatmiko et al., 2019; Hamada & Gina Puspitasari, 2022). Adapun maksud dari proses identifikasi yang ada adalah untuk melihat kondisi eksisting di Desa Wisata Jatiluwih sejak menjadi desa wisata, kesesuaian antaran prinsip dan kriteria dengan proses penerapan yang ada, sedangkan proses analisis digunakan sebagai masukan untuk menentukan suatu penanganan terhadap pengembangan desa wisata sehingga tindak lanjut pengembangan lebih sesuai dengan prinsip maupun kriteria desa wisata dan mengurangi permasalahan yang ada. Oleh sebab itu, sehingga tujuan studi ini tercapai, maka studi ini menggunakan suatu pendekatan sebagai berikut: [1] Identifikasi kondisi eksisting di Desa Wisata Jatiluwih sejak dijadikannya desa wisata; [2] Identifikasi kesesuaian prinsip dan kriteria Desa Wisata Jatiluwih; dan [3] Identifikasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan desa wisata Jatiluwih serta kebijakan pemerintah.

Pengumpulan data dilakukan dengan cara memperoleh data primer dan data sekunder. Data primer ini dilakukan dengan memperoleh informasi secara

langsung melalui metode observasi dan melakukan wawancara mendalam ke beberapa pihak yaitu Ketua Subak Jatiluwih, Pihak Badan Pengelola Daya Tarik Wisata Jatiluwih, dan Kepala Desa Jatiluwih. Pemilihan responden dalam wawancara mendalam ini dilakukan secara acak dan melihat tingkat pengetahuan berkaitan dengan kondisi masyarakat serta pengambil keputusan dalam perencanaan di Desa Jatiluwih. Sementara metode data sekunder diperoleh melalui literatur atau studi pustaka dan data dari instansi-instansi yang memiliki keterkaitan dengan wilayah penelitian (Hartanto & Yuuwono, 2020; Jordan & Ulimaz, 2019).

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif adalah proses mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode, mengkategorikan, mengartikan, dan menginterpretasikan data dan informasi kualitatif dan kuantitatif. Proses ini akan mendeskripsikan, menggambarkan fenomena atau hubungan antar fenomena yang diteliti secara sistematis, faktual, dan akurat (Azura et al., 2020; Yastri et al., 2022). Adapun teknik penyajian analisis data menggunakan teknik formal dan teknik informal. Karena penelitian ini dirancang sebagai penelitian kualitatif maka secara umum dalam penyajian hasil analisis data yang lebih banyak digunakan adalah teknik informal, yakni penyajian dalam bentuk kata-kata atau kalimat. Untuk melengkapi penggunaan teknik informal maka digunakan pula teknik formal yaitu penyajian dalam bentuk tabel dan gambar yang ada relevansinya dengan penelitian yang dilakukan. Pada bagian ini jelaskan bagaimana tahapan melakukan penelitian, desain penelitian, teknik

pengumpulan data, instrumen yang dibangun serta teknik analisi data (tools) yang digunakan.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Kondisi Eksisting Kawasan Desa Jatiluwih Berdasarkan Komponen Desa Wisata

#### a) Daya Tarik Desa Wisata Jatiluwih

Desa wisata Jatiluwih memiliki keterpaduan daya wisata yang menjadi keunggulan dari desa wisata ini. Terintegritasnya potensi wisata alam dengan perpaduan budaya masyarakat lokal memberikan nuansa yang unik. Apabila daya tarik tersebut diklasifikasikan dapat dijabarkan sebagai berikut;

- Daya Tarik Wisata Alam

Kondisi Desa Wisata Jatiluwih yang masih sangat alami dan memberikan kesejukan. Hal ini dikarenakan letak desa secara geografis yang berada di bawah kaki Gunung Batukaru, dan masih jarang permukiman masyarakat. Potensi wisata alam yang ada pada desa ini yaitu bentang alam yang sangat indah dengan pemandangan panorama terasering persawahan. Sementara potensi tersebut didukung dengan aktivitas masyarakat dalam bidang pertanian seperti proses membajak sawah, menanam padi, hingga proses panen menjadi daya tarik khusus. Bahkan banyak wisatawan yang sangat suka untuk melakukan trekking di kawasan terasering, bike cycling, maupun olahraga yoga karena tempatnya yang sangat tenang.



**Gambar 1.** Panorama Terasering Persawahan di Desa Wisata Jatiluwih (Sumber : Hasil Survey, 2022)

- Daya Tarik Wisata Budaya

Daya tarik wisata budaya di Desa Wisata Jatiluwih menjadi magnet utama bagi para wisatawan. Hal ini karena keberadaan komunitas masyarakat dalam mengorganisir sistem pengairan yang mendukung kegiatan pertanian masyarakat yang disebut Subak. Bahkan setelah dinobatkan menjadi salah satu warisan budaya dunia oleh UNESCO semakin banyak wisatawan yang bertandang ke desa wisata ini. Selain itu juga didukung dengan upacara-upacara keagamaan masyarakat maupun ritual. Ritual yang dilakukan berkaitan dengan sistem pertanian yang ada di Desa Wisata Jatiluwih dan prosesnya selalu dilakukan secara berurutan sesuai dengan proses menanam padi hingga panen. Bahkan sejak tahun 2017 mulai diadakan festival budaya pertanian Jatiluwih yang juga menjadi daya tarik utama wisata budaya di Desa Wisata Jatiluwih.





**Gambar 2.** Tradisi Budaya di Desa Wisata Jatiluwih (Sumber : [Jatiluwih.id](#))

b) Aksesibilitas

Berdasarkan kondisi eksistingnya, aksesibilitas menuju kawasan Desa Wisata Jatiluwih sudah didukung dengan kondisi jalan yang sudah beraspal. Adapun jarak dari pusat Kota Bali ke Desa Wisata Jatiluwih sekitar 40 km dengan waktu tempuh sekitar 50 menit. Sarana transportasi yang dapat digunakan dalam mengakses kawasan desa wisata ini dengan menggunakan kendaraan pribadi, travel, maupun menyewa kendaraan mobil atau motor. Biasanya tarif untuk menyewa kendaraan mobil dari Bali sekitar 500.000 dan motor sekitar 75.000/hari.

Kondisi aksesibilitas di kawasan desa Jatiluwih sudah sangat layak dengan kondisi jalan sudah beraspal dan kapasitas jalan yang mampu menampung kendaraan mobil maupun motor. Bahkan telah adanya akses jalur trekking bagi wisatawan untuk menikmati kawasan terasering persawahan. Sementara itu untuk sarana transportasi sudah didukung dengan adanya rental kendaraan motor maupun sepeda. Tarif untuk rental kendaraan motor 75.000/jam untuk wisatawan domestik dan 125.000/jam untuk wisatawan mancanegara. Pada dasarnya tarif sewa kendaraan ini masih relatif mahal untuk wisatawan.



**Gambar 3.** Jalur Trekking di Kawasan Terasering (Sumber : Hasil Survey, 2022)

c) Ketersediaan Fasilitas Wisata dan Umum

Ketersediaan fasilitas wisata maupun fasilitas umum di kawasan Desa Wisata Jatiluwih menjadi sarana pendukung untuk menciptakan kemudahan dan kenyamanan maupun keselamatan wisata bagi wisatawan selama melakukan kunjungan wisata.

- Ketersediaan Fasilitas Wisata

Beberapa komponen fasilitas wisata yang sudah ada di desa wisata ini yaitu penginapan yang terdiri atas 2 jenis penginapan yaitu Bhuana Agung dan Teras Subak, restaurant yang terdiri atas Gong Jatiluwih, Bhuana Agung, Warung Dhea, J. Terrace, dan Billy's Terrace. Fasilitas wisata lainnya yang tersedia berupa tiket masuk, toko kerajinan/souvenir, tempat sampah di beberapa titik jalur wisata, tourist information, toilet, dan parkir. Ketersediaan fasilitas wisata di Desa Wisata Jatiluwih sudah cukup memadai, namun ketersediaan homestay yang seharusnya dikelola oleh masyarakat lokal perlu menjadi perhatian pihak pengambil kebijakan pada kawasan desa wisata ini.



**Gambar 4.** Fasilitas Wisata di Kawasan Desa Wisata Jatiluwih (Sumber : Hasil Survey, 2022)

- Ketersediaan Fasilitas Umum

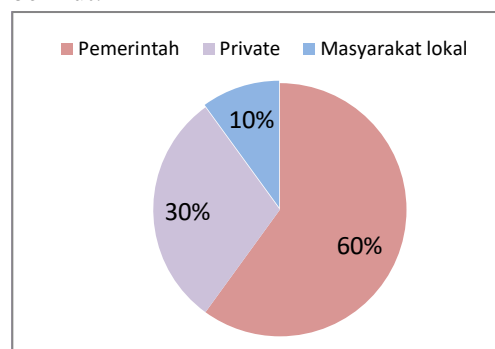
Berdasarkan kondisi eksistingnya bahwa, Desa Wisata Jatiluwih sudah didukung dengan ketersediaan fasilitas umum yang memadai. Komponen fasilitas wisata umum yang menjadi penilaian ditinjau dari ketersediaan jaringan telekomunikasi dan listrik, drainase dan irigasi, atm, puskesmas, toko kelontongan, dan warung internet, money changer. Komponen yang terlihat belum tersedia di kawasan ini seperti warnet, dan money changer.

d) Partisipasi Masyarakat

Pada dasarnya tingkat partisipasi masyarakat lokal dalam mengelola Desa Wisata Jatiluwih belum dilakukan secara maksimal. Hal ini karena terlihat bahwa masyarakat lokal belum diberdayakan secara total dalam mengelola segala unsur pariwisata yang ada. Komponen yang menjadi penilaian dalam keterlibatan masyarakat ini berdasarkan keterlibatan sebagai penyedia jasa transportasi, guide, pengelola usaha toko kerajinan, pengelola penginapan, pengelola restaurant, dan sebagai anggota kelompok kesenian. Beberapa komponen yang belum terlihat dilakukan oleh masyarakat lokal yaitu sebagai penyedia jasa transportasi, serta pemandu. Sementara kegiatan lainnya yang sudah terlihat namun masih sangat jarang yaitu pemberdayaan kelompok masyarakat untuk membuka usaha

kerajinan. Keterlibatan masyarakat lokal sebagai pengelola restaurant maupun penginapan sudah mulai terlihat, meskipun secara garis usaha tersebut dikelola secara personal oleh pihak-pihak pengusaha (Mahastanti et al., 2015; Sholeh, 2005). Sehingga potensi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat belum maksimal.

Apabila kita merepresentasikan bentuk keterlibatan pihak masyarakat, pemerintahan, maupun pengusaha dalam mengelola Desa Wisata Jatiluwih ke dalam persentase dapat dijabarkan sebagai berikut:



**Gambar 1.** Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Mengelola Desa Wisata Jatiluwih (Sumber : Hasil Analisis, 2022)

Persentase di atas menunjukkan bahwa keterlibatan pemerintah yang paling besar dalam mengelola Desa Wisata Jatiluwih sebesar 60%, sementara pengusaha sebesar 30%, dan masyarakat lokal hanya 10%.

## 2. Kesesuaian Kriteria dan Prinsip Desa Wisata Berdasarkan Implementasinya di Desa Wisata Jatiluwih

a) Kesesuaian Kriteria Desa Wisata Berdasarkan Implementasinya di Desa Wisata Jatiluwih

Menurut Soemarno (2010) suatu desa dapat menjadi desa wisata apabila memiliki potensi yang unik atau daya tarik

yang unik, adanya tingkat penerimaan dan komitmen dari masyarakat, tersedianya sumber daya manusia lokal, sistem kepercayaan dan kemasyarakatan, tersedianya infrastruktur yang memadai, dan aktifnya kegiatan promosi serta pemasaran. Apabila melihat kondisi yang ada di Desa Wisata Jatiluwih berdasarkan masing-masing kriteria tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut.

- **Daya Tarik Wisata**

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa Desa Wisata Jatiluwih memiliki potensi daya tarik wisata yang unik bahkan terintegrasi antara wisata alam, maupun budaya. Wisata alam dengan pemandangan terasering persawahan dan gunung Batukaru. Sementara budaya mengenai upacara ritual masyarakat terhadap sistem pertanian, maupun keagamaan, dan organisasi masyarakat dalam mengelola sistem pengairan yang disebut dengan Subak.

- **Masyarakat Menerima dan Komitmen**

Pada dasarnya masyarakat mau menerima serta ada komitmen terhadap pengembangan desa wisata Jatiluwih ini. Hal itu didasarkan atas beberapa pembangunan akses jalan ke kawasan pertanian, dan mulai meningkatkan pendapatan perekonomian bagi masyarakat lokal.

*“Seorang Masyarakat di Desa Jatiluwih mengatakan bahwa selama desa ini menjadi desa wisata kami sebagai petani diringkatkan dengan adanya trekking jalan, adanya pengairan, sehingga bawa hasil panen yang dulunya masih sulit sekarang sudah dipermudah”*

Pada dasarnya sebagian besar masyarakat menjadikan penetapan Desa

Jatiluwih sebagai desa wisata sebagai nilai positif untuk berbenah diri dan mulai ikut terlibat aktif dalam pengembangan Desa Wisata Jatiluwih sehingga semakin banyak memberikan peningkatan pendapatan kepada masyarakat lokal hingga ke pembangunan Desa Jatiluwih sendiri.

- **Ketersediaan Sumber Daya Manusia Lokal**

Berdasarkan kondisi yang ada ketersediaan sumber daya manusia lokal yang ada di Desa Wisata Jatiluwih bisa dibilang cukup banyak. Pernyataan ini disesuaikan dengan jumlah masyarakat yang ada pada tingkatan SMA tidak melanjutkan ke tingkat perguruan tinggi. Oleh sebab itu perlu untuk memberikan keterlibatan kepada masyarakat lokal secara aktif khususnya pemuda untuk menjadi pemandu lokal, penyedia jasa transportasi bahkan sebagai pengelola desa wisata. Apabila dilakukan perhitungan terhadap persentase jumlah masyarakat berdasarkan tingkat pendidikan, bahwa yang mampu memberikan kontribusi terhadap pengelolaan di Desa Jatiluwih sekitar 14,8% dari 2834 penduduk yang mampu menyelesaikan pendidikan. Persentase ini berdasarkan tingkat pendidikan masyarakat dari SMA hingga S2.

- **Sistem Kepercayaan dan Kemasyarakatan**

Berdasarkan Perda Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2015 mengenai Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata di Provinsi Bali Tahun 2015-2029 yang menekankan bahwa kepariwisataan budaya Bali berlandas pada ajaran Agama Hindu dan falsafah *Tri Hita Karana* (Arcana, 2016; Muhaimin, 2018). Sesuai dengan kepercayaan serta ritual-ritual yang dianut oleh masyarakat lokal selama ini



memberikan dampak perkembangan sosial budaya kepada masyarakat Desa Wisata Jatiluwih. Adapun dampak tersebut dapat diklarifikasikan ke dalam beberapa aspek meliputi kegotongroyongan, budaya pertanian, dan organisasi social (Allison et al., 2008; Papagapitos & Riley, 2009).

- Ketersediaan Ruang untuk Pengembangan

Pada dasarnya luas Desa Wisata Jatiluwih ini sekitar 33,22 km<sup>2</sup> dengan sistem persebaran rumah masyarakat yang tersebar menyatu pada beberapa titik dengan tingkat kepadatan yang masih rendah. Meskipun beberapa area lahan tidak diizinkan untuk dilakukan kegiatan alih fungsi lahan karena merupakan kawasan jalur hijau, namun beberapa fasilitas dapat dikembangkan dengan memfungsikan beberapa potensi sumber daya yang sudah ada.

Hal ini seperti penginapan yang menggunakan sistem homestay di rumah masyarakat lokal sehingga wisatawan tidak hanya sekedar melihat keindahan alam yang ada di desa ini juga ikut serta dalam kegiatan masyarakat lokal. Berdasarkan RTRW Kabupaten Tabanan Tahun 2012 hingga 2032 yang menjelaskan bahwa ruang wilayah Kabupaten Tabanan termasuk di dalamnya Desa Wisata Jatiluwih perlu dikembangkan secara lestari, aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan yang berlandaskan kebudayaan Bali sesuai dengan falsafah Tri Hita Karana.

- Ketersediaan Infrastruktur

Ketersediaan infrastruktur di kawasan Desa Wisata Jatiluwih sudah memadai dengan ketersediaan fasilitas wisata dan fasilitas umum. Adapun beberapa fasilitas wisata yang ada seperti penginapan, restaurant, jalur trekking

wisata, ketersediaan pelayanan transportasi, adanya pemandu, toilet, parkir, dan layanan informasi bagi wisatawan. Sementara untuk fasilitas umum seperti ketersediaan jaringan listrik, air bersih, drainase, telepon, puskesmas, ATM, dan tempat sampah. Namun yang menjadi kekurangan dalam pelayanan infrastruktur di desa wisata ini mengenai penetapan rumah-rumah masyarakat lokal yang dijadikan sebagai homestay belum terealisasi dan terlihat beberapa bangunan restoran maupun penginapan menggunakan konsep modern dan permanen sehingga mengurangi estetika unsur alami dan budaya di kawasan Desa Wisata Jatiluwih.

- Promosi dan Pemasaran

Dalam meningkatkan kunjungan wisatawan ke Desa Wisata Jatiluwih perlu dilakukan usaha promosi dan pemasaran yang maksimal. Berkaitan dengan hal itu, beberapa hal yang sudah dilakukan pemerintah dalam memperkenalkan Desa Wisata Jatiluwih melakukan sistem promosi melalui brosur, website, sistem kerjasama dengan travel maupun hotel, dan melalui media sosial. Salah satu program pemasaran yang baru dilaksanakan pada tahun 2017 di Desa Wisata Jatiluwih yaitu diadakannya event Agricultural Festival Jatiluwih pada bulan Juni hingga Agustus. Selama proses kegiatan ini setiap harinya mengundang sekitar 600-700 orang wisatawan.

b) Kesesuaian Prinsip Desa Wisata Berdasarkan Implementasinya di Desa Wisata Jatiluwih

Dalam hal ini terdapat beberapa prinsip desa wisata yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan suatu desa wisata. Adapun prinsip-prinsip tersebut jika dibandingkan dengan implementasi

pengembangan Desa Wisata Jatiluwih saat ini dapat dijabarkan sebagai berikut.

- Tidak Bertentangan dengan Adat Istiadat atau Budaya Masyarakat Desa Setempat

Berdasarkan kondisi yang terlihat bahwa di Desa Wisata Jatiluwih bahwa pengembangan yang dilakukan tetap mempertahankan nilai-nilai yang dianut sesuai dengan konsep falsafah Tri Hita Karana. Bahkan wisatawan yang melakukan kunjungan ke desa ini mempelajari segala hal yang menjadi kepercayaan masyarakat lokal. Seperti yang diketahui bahwa keunikan dari Desa Wisata Jatiluwih adalah adanya organisasi Subak Jatiluwih. Oleh sebab itu, masyarakat lokal bahkan organisasi Subak tetap mempertahankan nilai-nilai yang ada dalam sistem kebudayaan mereka.

- Pembangunan Fisik ditujukan untuk Meningkatkan Kualitas Lingkungan Desa

Adapun dalam pengembangan pariwisata di suatu desa pada hakekatnya tidak merubah apa yang sudah ada di desa tersebut, tetapi lebih kepada upaya merubah apa yang ada di desa dan mengemasnya sedemikian rupa untuk menjadi hal yang layak dipromosikan. Sejak Desa Wisata Jatiluwih mengalami peningkatan jumlah pengunjung banyak pembangunan mulai dilakukan di desa ini khususnya dalam meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana. Terhadap pembangunan ini masyarakat lokal menjadi khawatir bahwa pembangunan tersebut bisa mengancam kelestarian desa khususnya area persawahan yang merupakan milik masyarakat local (Arcana, 2016; Hamid, 2006). Oleh sebab itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk melindungi

area jalur hijau dan melakukan pembatasan. Namun dari persepsi masyarakat lokal pemerintah kurang konsisten dengan kebijakan yang dikeluarkan karena pernah ada kasus upaya membangun hotel di kawasan desa wisata ini meskipun akhirnya diberhentikan.

- Memperhatikan Unsur Kelokalan dan Keaslian

Terhadap kondisi yang ada bahwa beberapa jenis bangunan restaurant maupun penginapan yang ada di Desa Jatiluwih terlihat tidak memperlihatkan unsur kelokalan maupun keaslian dari desa ni. Bahkan produk-produk yang diperjualbelikan mulai menganut pada kebutuhan orang barat bukan memperlihatkan kearifan lokal masyarakat. Adapun kepercayaan masyarakat lokal bahwa banyaknya pura sehingga bangunan lain tidak boleh melebihi ketinggian pura itu sendiri kawasan sifatnya tidak suci. Beberapa kasus yang pernah terjadi terhadap pembangunan uatu rumah yang bertingkat dan hotel. Hal ini sebenarnya sangat mengganggu perkembangan Desa Wisata Jatiluwih untuk tetap dengan unsur kelokalan dan keasliannya. Oleh sebab itu, perlu menjadi perhatian bagi pemerintah dan para pemangku kepentingan untuk pengembangan ke depannya lebih disesuaikan dengan keaslian desa (Hulu et al., 2018; Oktaviana & Bachruddin, Triady, 2017).

- Memberdayakan Masyarakat Desa Wisata

Keterlibatan masyarakat lokal di Desa Wisata Jatiluwih belum sepenuhnya terlibat langsung untuk mengelola segala aspek pendukung pengembangan desa wisata ini. Hal ini tercermin dari beberapa anggota masyarakat yang bahkan tidak mengetahui mengenai beberapa kegiatan

yang akan diselenggarakan di Desa Wisata Jatiluwih. Sementara itu kelompok kesenian, kerajinan belum terkelola dengan baik, bahkan pengadaan homestay yang menggunakan rumah-rumah penduduk lokal juga belum diimplementasikan.

- Memperhatikan Daya Dukung dan Daya Tampung serta Berwawasan Lingkungan

Kondisi pengembangan Desa Wisata Jatiluwih masih memperhatikan unsur keberlanjutan lingkungan. Hal ini ditunjukkan dengan aturan pemerintah untuk melarang pembangunan di jalur hijau dan berbagai kegiatan alih fungsi lahan maupun hal-hal yang dapat merusak keberlanjutan Desa Wisata Jatiluwih. Sehingga proses pengembangan Desa Wisata Jatiluwih harus memperhatikan kapasitas fisik maupun kapasitas masyarakatnya. Desa Jatiluwih yang terkenal dengan potensi subaknya harus tetap dilestarikan begitupun dengan ada istiadat masyarakat Desa Wisata Jatiluwih. Karena apabila tidak dikendalikan maka pengembangan Desa Wisata Jatiluwih akan merusak lingkungan alam maupun kehidupan sosial budaya masyarakat. Prinsip dasar dari pengembangan desa wisata yaitu pariwisata yang berkelanjutan. Oleh sebab itu, segala unsur yang ada dalam desa wisata harus memperhatikan keberlanjutan.

### **3. Partisipasi Masyarakat Desa Wisata Jatiluwih**

Pada dasarnya masyarakat lokal berperan penting dalam pengembangan desa wisata karena sumber daya dan keunikan tradisi dan budaya yang melekat pada komunitas tersebut merupakan unsur penggerak utama kegiatan desa wisata. Masyarakat lokal berperan sebagai tuan rumah dan menjadi pelaku penting dalam

pengembangan desa wisata dalam keseluruhan tahapan mulai dari tahap perencanaan, pengawasan, dan implementasi. Oleh sebab itu, kedudukan masyarakat lokal sama pentingnya dengan pemerintah maupun pihak swasta sebagai pemangku kepentingan dalam pengembangan pariwisata.

#### **a) Partisipasi Masyarakat Lokal dalam Tahap Perencanaan**

Pada dasarnya dalam pengembangan desa wisata, masyarakat Desa Wisata Jatiluwih kurang dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan perencanaan. Salah satu contohnya yaitu mengenai kasus kontrak Billy's Terrace Cafe yang berada pada desa wisata. Adapun pada awal pendiriannya kafe ini diberi nama Cafe Jatiluwih karena merupakan milik masyarakat lokal dan proses pembangunan atas inisiatif masyarakat serta dibangun di atas tanah milik Pura Dalem. Pada awalnya pengelolaan dilakuka oleh masyarakat lokal namun kurangnya keuntungan dan pengelolaan yang kurang maksimal sehingga dikontrakkan oleh desa adat Jatiluwih. Namun proses pengambilan keputusan mengenai besarnya biaya sewa, jangka waktu kontrak, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan perjanjian kontrak tidak melibatkan masyarakat lokal. Adapun implementasi dari konsep Tri Hita Karana yang dianut oleh masyarakat lokal menjadi tidak berjalan dengan baik karena pada tahap perencanaan masyarakat tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini menyebabkan terjadinya ketidakharmonisan hubungan antara masyarakat dengan badan pengelola, desa adat, dan pemerintah.

#### **b) Partisipasi Masyarakat Lokal dalam Tahap Implementasi.**

Dalam ini mengenai keterlibatan

masyarakat lokal dalam mengelola segala fasilitas wisata yang ada di desa wisata. Beberapa contohnya seperti menjadi pengelola homestay, pengelola rumah makan, pemandu wisata, penyedia transportasi lokal, pengelola atraksi wisata, maupun mengelola beberapa program pemberdayaan seperti kesenian maupun keterampilan. Kondisi di Desa Wisata Jatiluwih menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat lokal dalam tahap implementasi masih sangat minim. Sekalipun ada tapi kegiatan tersebut hanya berwujud pada pengelolaan usaha berskala kecil. Karena kurangnya modal dan peluang usaha serta pemberdayaan secara maksimal mengakibatkan masyarakat lokal kalah saing dengan pengusaha yang memiliki modal serta peluang yang besar. Beberapa rumah makan serta penginapan justru dikelola oleh pihak dari luar desa bahkan mengambil peluang masyarakat lokal. Kesejangan pendapatan dan kesejahteraan antara lapisan masyarakat semakin besar, pada akhirnya masyarakat lokal tetap berada di posisi marginal dalam usaha yang justru terjadi di wilayahnya sendiri. Kondisi ini menggambarkan masyarakat lokal masih belum merasakan dampak kesejahteraan yang merata terhadap pengembangan desa wisata.

#### c) Partisipasi Masyarakat Lokal dalam Tahap Pengawasan

Salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan dengan adanya pembentukan Badan Pengelola Daya Tarik Wisata Jatiluwih berdasarkan Peraturan Bupati Tabanan Nomor 84 Tahun 2013. Dalam hal ini, masyarakat yang bekerja pada badan pengelola daya tarik wisata melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan operasionalisasi kegiatan desa wisata. Masyarakat melakukan

pengawasan secara aktif dan langsung melakukan tugasnya masing-masing sesuai yang sudah ditentukan oleh badan pengelola. Adapun pengawasan biasanya dilakukan oleh masyarakat yang bekerja sebagai petugas tiket, parkir, keamanan, pemandu wisata dan trekking. Bidang pengawas bertugas untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan Desa Wisata Jatiluwih. Monitoring dilakukan terhadap program-program pengembangan desa wisata, baik mencakup aspek perencanaan dan pelaksanaan (Biernacka et al., 2020; Rae & Wong, 2012; Rosenbaum et al., 2009). Namun setelah kepengurusan berjalan selama kurang lebih satu tahun, pengawasan yang dilakukan berjalan kurang efektif. Selama peningkatan jumlah kunjungan wisatawan memberikan dampak pada peningkatan fasilitas yang diperlukan. Alhasil kondisi ini menyebabkan terjadinya pembangunan fasilitas restoran maupun penginapan yang tidak terkendali dan tidak sesuai dengan aturan tata ruang.

*“Ketua Subak Jatiluwih mengatakan bahwa pengawasan terhadap zonasi warisan budaya dunia juga dilakukan namun pengawasan tersebut mengalami kendala, selain disebabkan oleh kurang keterlibatan masyarakat dalam pembuatan perencanaan pengembangan desa wisata juga tidak terketahuinya hal-hal yang harus direncanakan maupun yang perlu diawasi. Bahkan masyarakat setempat merasa tidak memiliki kompetensi untuk melakukan pengawasan”*

Partisipasi masyarakat lokal dalam mengelola Desa Wisata Jatiluwih memunculkan beberapa permasalahan utama yaitu;

- Belum membentuk bahkan melakukan pemberdayaan terhadap sistem

kelompok kesenian dan kerajinan

- Beberapa restaurant maupun penginapan belum dikelola oleh masyarakat lokal secara utuh
- Pengelolaan ODTW belum sepenuhnya melibatkan masyarakat
- Sistem penginapan belum berorientasi homestay
- Pemandu wisata belum memaksimal pemuda atau pemudi lokal
- Penyedia jasa transportasi belum dikelola oleh masyarakat Lokal

Pada dasarnya pentingnya pemberdayaan masyarakat dalam prinsip desa wisata menjadi suatu hal yang perlu diperhatikan. Beberapa aspek kunci dalam pemberdayaan masyarakat yaitu :

- Masyarakat membentuk panitia atau lembaga untuk pengelolaan kegiatan wisata di desa wisata dengan dukungan dari pemerintah dan organisasi masyarakat
- Prinsip local ownership, yaitu pengelolaan dan kepemilikan oleh masyarakat setempat. Adapun prinsip ini diterapkan sedapat mungkin terhadap sarana dan prasarana wisata di kawasan desa wisata.
- Homestay menjadi pilihan utama untuk sarana akomodasi di lokasi desa wisata
- Pemandu adalah masyarakat lokal

Perintisan, pengelolaan, dan pemeliharaan objek wisata menjadi tanggung jawab masyarakat setempat termasuk penentuan biaya untuk wisatawan.

#### D. KESIMPULAN

Desa Wisata Jatiluwih memiliki potensi wisata yang terintegrasi baik wisata alam maupun wisata budaya. Pembentukan Desa Jatiluwih sebagai desa

wisata sudah dilakukan sejak tahun 1994, namun wisatawan mulai mengalami peningkatan pada tahun 2012 sejak dijadikannya Subak Jatiluwih sebagai salah satu warisan budaya dunia oleh UNESCO.

Berkaitan dengan mulai meningkatnya kunjungan wisatawan berbagai jenis pengembangan mulai dilakukan di desa wisata ini baik dari pembangunan infrastruktur, peningkatan jumlah penginapan dan restaurant, dan beberapa sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pariwisata di Desa Jatiluwih.

Partisipasi masyarakat lokal menjadi kunci penting dalam keberlanjutan desa wisata ini. Apabila melihat keterlibatan masyarakat dalam mengelola Desa Wisata Jatiluwih masih sangat minim sehingga perlu pemberdayaan yang lebih maksimal lagi bagi masyarakat lokal untuk ikut aktif berpartisipasi dalam pengelolaan desa wisata mulai dari perencanaan, implementasi, maupun pengawasan sehingga nilai-nilai Tri Hita Karana tetap terjaga di desa ini.

#### E. DAFTAR PUSTAKA

##### BUKU :

Ainun, F., Krisnani, H., & Darwis, R. S. (2014). Pengembangan Desa Wisata Melalui Konsep Community Based Tourism. *Prosiding KS: Riset & PKM*, 2(3), 341–346.

Allison, W. P., Jon, C. C., & John, C. S. (2008). Toward a Theory of Families: A Social Capital Perspective. *Entrepreneurship Theory and Practice*, 32(6), 949–969.

<http://ejournals.ebsco.com/direct.asp?ArticleID=470A90D1298A844D00>



34

- Ambarsari, W. (2017). Pembangunan Inklusif Desa-Kota Melalui Pengembangan Kawasan Agropolitan. *Prosiding-Seminar-Nasional-Perencanaan-Pembangunan-Inklusif-Desa-Kota*, 805–816. <http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota> 805
- Anggraini, L. M. (2015). *Place Attachment, Place Identity and Tourism in Jimbaran and Kuta , Bali*. July.
- Arcana, K. T. P. (2016). Persepsi Masyarakat Lokal Terhadap Perkembangan Akomodasi Pariwisata Studi Kasus : Desa Adat Seminyak, Kecamatan Kuta Kabupaten Badung, Bali. *Analisis Pariwisata*, 16(1), 52–60.
- Azura, V., Mudana, W., Si, M., Margi, K., Program, M. S., Sosiologi, S. P., Sejarah, J., & Perpustakaan, S. (2020). STUDI KEBERTAHANAN IDENTITAS ETNIK BUGIS DALAM MASYARAKAT MULTIKULTURAL DAN POTENSINYA SEBAGAI SUMBER BELAJAR SOSIOLOGI DI SMA (Di Kelurahan Kampung Bugis, Kabupaten Buleleng, Bali). *Jurnal Pendidikan Sosiologi Undiksha*, 1(2), 183–193. <https://doi.org/10.23887/jpsu.v1i2.26687>
- Bichler, B. F., & Lösch, M. (2019). Collaborative Governance in Tourism: Empirical Insights into a Community-Oriented Destination. *Sustainability*, 11(23), 6673. <https://doi.org/10.3390/su11236673>
- Biernacka, M., Kronenberg, J., & Łaskiewicz, E. (2020). An integrated system of monitoring the availability, accessibility and attractiveness of urban parks and green squares. In *Applied Geography*. Elsevier. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0143622819307374>
- Dani Rahu, P., & Suprayitno. (2021). Kolaborasi Model Pentahelix Dalam Pengembangan Desa Wisata Sei Gohong Kecamatan Bukit Batu Kota Palangka Raya. *Journal Ilmu Sosial, Politik Dan Pemerintahan*, 10(1), 13–24. <https://doi.org/10.37304/jispar.v10i1.2286>
- Djatmiko, A., Syarifuddin, D., Raharja, A. B., & Fitriani, S. A. (2021). Assessment of local communities capacities on developing ethnographic tourism of Kampung Naga, West Java, Indonesia. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 737(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/737/1/012059>
- Djatmiko, Ari, Firmansyah, F., Priyandoko, Z., & Syarifudin, D. (2019). Kajian Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Dan Pengetahuan Masyarakat Tentang Pemanfaatan Ruang Di Kawasan Pusat Kota Bandung. *PROSIDING SEMINAR NASIONAL ASPI 2019; Percepatan Penyelenggaraan Penataan Ruang Yang Inklusif, Inovatif, Dan Berkelanjutan*, October, 545–554.
- Eko, S. (2014). Desa Membangun Indonesia. In *Academia.Edu*.

- [http://www.academia.edu/download/34492495/Buku\\_Desa\\_Membangun\\_Indonesia\\_Sutoro\\_Eko.pdf](http://www.academia.edu/download/34492495/Buku_Desa_Membangun_Indonesia_Sutoro_Eko.pdf)
- Fisk, D. (2013). Cities of the future. *Urban Energy Systems: An Integrated Approach*, 261–271. <https://doi.org/10.4324/9780203066782-27>
- Hamada, F., & Gina Puspitasari. (2022). Identifikasi Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata Lamajang Kabupaten Bandung. *Bandung Conference Series: Urban & Regional Planning*, 2(2), 385–397. <https://doi.org/10.29313/bcsurp.v2i2.3424>
- Hamid, A. (2006). Potensi Modal Sosial Pada Budaya Lokal Dalam Pembangunan Daerah. *Jurnal Jaffray*, 4(1), 1. <https://doi.org/10.25278/jj71.v4i1.128>
- Hartanto, T., & Yuuwono, A. B. (2020). Konsep tata ruang permukiman Baluwarti Keraton Kasunanan Surakarta. *JURNAL ARSITEKTUR PENDAPA*, 3(2), 1–10. <https://doi.org/10.37631/pendapa.v3i2.162>
- Hulu, Y., Harahap, R. H., & Nasutian, M. A. (2018). Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Jupiiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 146. <https://doi.org/10.24114/jupiiis.v10i1.9974>
- Ishak, R. F., & Syarifudin, D. (2014). Analisis tipologi wilayah sebagai arahan untuk kebijakan penyerasian pengembangan wilayah. *Jurnal Planologi Unpas*, 1(1), 59–74.
- Isnawati & Lea Emilia Farida. (2018). Strategi pengembangan potensi wisata pulau bokori provinsi sulawesi tenggara. *Prosiding Seminar Nasional ASBIS 2018, Politeknik Negeri Banjarmasin, 6014*, 206–214.
- Jansen-Verbeke, M. (2009). The territoriality paradigm in cultural tourism. *Turyzm/Tourism*, 19(1–2), 25–31. <https://doi.org/10.2478/V10106-009-0003-z>
- Jordan, N. A., & Ulimaz, M. (2019). HUBUNGAN ANTARA PERILAKU MASYARAKAT DAN PEMBENTUKAN RUANG PUBLIK. *BORDER*, 1(2), 61–72. <https://doi.org/10.33005/border.v1i2.19>
- Komariah, N., Saepudin, E., & Yusup, P. M. (2018). Pengembangan Desa Wisata Berbasis Kearifan Lokal. *Jurnal Pariwisata Pesona*, 3(2), 158–174. <https://doi.org/10.26905/jpp.v3i2.2340>
- Lily Dianasari, D. A. M. (2021). DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP EKONOMI DAN LINGKUNGAN FISIK DI DESA WISATA DI BALI. *JURNAL KEPARIWISATAAN*, 20(2), 99–106. <https://doi.org/10.52352/jpar.v20i2.469>
- Mafaza, A., & Setyowati, K. (2020). Collaborative Governance Dalam Pengembangan Desa Wisata. *Jurnal Kebijakan Publik*, 11(1), 7. <https://doi.org/10.31258/jkp.11.1.p.7-12>
- Mahastanti, L. A., Nugrahanti, Y. W., & Hartini, S. (2015). Keunggulan Kompetitif Melalui Proses Inovasi

- Menggunakan Pendekatan Knowledge Management ( Studi Pada Pengusaha Kerupuk Tuntang Kab . Semarang ). *4th Economics & Business Research Festival 2015, November*, 978–979.
- Muhaimin. (2018). Kedudukan Kearifan Lokal Dalam Penataan Ruang Provinsi Bali. *Pusat Penelitian Dan Pengembangan Hukum Badan*, 18(3), 59–71. [https://doi.org/10.14258/izvasu\(2018\)3-13](https://doi.org/10.14258/izvasu(2018)3-13)
- Oktaviana, O., & Bachruddin, Triady, D. (2017). Kebijakan Peningkatan Kontribusi Ekonomi Kreatif Bagi Perekonomian di Provinsi Banten. *Seminar Nasional Riset Terapan 2017: Pembangunan Berkelanjutan Melalui Pemanfaatan Hasil Riset Terapan, November*, 88–93. <http://e-jurnal.lppmunsera.org/index.php/senasset/article/view/430/504>
- Papagapitos, A., & Riley, R. (2009). Social trust and human capital formation. *Economics Letters*, 102(3), 158–160. <https://doi.org/10.1016/j.econlet.2008.12.006>
- Purnamasari, A. M. (2011). Pengembangan Masyarakat Untuk Pariwisata di Kampung Wisata Toddabojo Provinsi Sulawesi Selatan. *Journal of Regional and City Planning*, 22(1), 49. <https://doi.org/10.5614/jpww.2011.22.1.4>
- Rae, A., & Wong, C. (2012). Monitoring spatial planning policies: Towards an analytical, adaptive, and spatial approach to a “wicked problem.” *Environment and Planning B: Planning and ...* <https://doi.org/10.1068/b37112>
- Revayanti, I. (2017). Masterplan Desa Wisata Lamajang Lamajang Tourism Village Master Plan. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 105(2), 79. <https://core.ac.uk/download/pdf/322599509.pdf>
- Robertson, P. J. (2011). An assessment of collaborative governance in a network for sustainable tourism: The case of redeturis. In *International Journal of Public Administration* (Vol. 34, Issue 5). <https://doi.org/10.1080/01900692.2010.550078>
- Rosenbaum, D., Kurz, F., Thomas, U., Suri, S., & ... (2009). Towards automatic near real-time traffic monitoring with an airborne wide angle camera system. In *European Transport ...* Springer. <https://doi.org/10.1007/s12544-008-0002-1>
- Salazar, N. B. (2012). Community-based cultural tourism: issues, threats and opportunities. *Journal of Sustainable Tourism*, 20(1), 9–22. <https://doi.org/10.1080/09669582.2011.596279>
- Samsudin, P. Y., Maliki, N. Z., Rahman, S., & Omar, W. R. W. (2021). Attachment and factors of involvement among youth to paddy field activities in homestay programmes. *Planning Malaysia*, 19(16), 85–96. <https://doi.org/10.21837/PM.V19I16.954>
- Shehade, M., & Stylianou-Lambert, T. (2020). Revisiting Authenticity in the Age of the Digital Transformation of Cultural Tourism.

- In *Springer Proceedings in Business and Economics* (pp. 3–16). Springer Nature. [https://doi.org/10.1007/978-3-030-36342-0\\_1](https://doi.org/10.1007/978-3-030-36342-0_1)
- Sholeh, M. (2005). Dampak Kenaikan Upah Minimum Propinsi Terhadap Kesempatan Kerja (Studi Kasus Provinsi Jawa Tengah). *Jurnal Ekonomi & Pendidikan*, 2(2), 156–167.
- Subejo, S., Chamidah, N., Nirmalasari, N., Suyoto, S., Hariadi, S. S., Muhamad, M., Selvi, A. M., Siddiq, D. M., Imawan, K., & Isamayana, I. (2021). Strategi Komunikasi Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dalam Pengembangan Ketahanan Desa Wisata Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Cirebon. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 27(1), 90. <https://doi.org/10.22146/jkn.61859>
- Sudibya, B. (2018). BALI MEMBANGUN BALI JURNAL BAPPEDA LITBANG Wisata Desa dan Desa Wisata. *Bali Membangun Bali Jurnal Bappeda Litbang*, 1(1), 22–25. <http://www.berdesa.com/apa-beda-desa-wisata-dan-wisata-des>
- Suherman, D., Sugandi, Y. S., & Alexandri, M. B. (2021). Aktor Politik dan Kolaborasi Quadruple Helix dalam Pembentukan Daerah Otonomi Baru Kabupaten Garut Selatan. *Politicon : Jurnal Ilmu Politik*, 3(1), 60–87. <https://doi.org/10.15575/politicon.v3i1.11197>
- Sumatra, W. (2020). Frontmatter. In *Proceedings of Tourism Development Centre International Conference* (pp. I–II). Sciendo. <https://doi.org/10.2478/9788395720406-fm>
- Susanti, W. D., Safeyah, M., & Mutia, F. (2022). WUJUD KEBERAGAMAN RUANG ARSITEKTUR DI PESISIR SURABAYA (TINJAUAN RUANG PERTAHANAN DAN KETAHANAN). *Mintakat: Jurnal Arsitektur*, 23(1), 60–70. <https://doi.org/10.26905/jam.v23i1.6222>
- Tabanan, K., Made Darma Oka, B. I., Sudiarta, M., Widya Darmayanti, P., Pariwisata, J., Negeri Bali, P., Pariwisata Politeknik Negeri Bali, J., & Pariwisata Denpasar, A. (2021). Warisan “Cagar Budaya” sebagai Ikon Desa Wisata Kaba-Kaba. *Jurnal Seni Budaya*, 36(2), 163–169.
- Yastri, M. J., Astuti, W., & Putri, R. A. (2022). Kebertahanan fisik Kampung Beting sebagai kawasan permukiman waterfront heritage. *Region : Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Perencanaan Partisipatif*, 17(1), 199. <https://doi.org/10.20961/region.v17i1.133390>
- \_\_\_\_\_, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Kepariwisataaan Daerah Provinsi Bali Tahun 2015-2019.
- \_\_\_\_\_, Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabanan Tahun 2012-2032.